

Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tiga Dob Di Provinsi Lampung (Studi Kasus : Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat)

Anggi Adya Pratiwi¹, Marselina², Arivina Ratih Yanuar Taher³, Zulfa Emalia⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Article history:

Received Desember 1, 2025
Revised Desember 7, 2025
Accepted Desember 15, 2025

Kata Kunci:

Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan,
Fungsi Kesehatan,
Infrastruktur Konektivitas,
Perlindungan Sosial dan
Pertumbuhan Ekonomi

Keywords:

*Government Spending on Education Function,
Health Function,
Connectivity Infrastructure,
Social Protection and Economic Growth*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Infrastruktur Konektivitas dan Perlindungan Sosial terhadap pertumbuhan ekonomi pada 3 Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung tahun 2017-2023. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan *Common Effect Model* (CEM) yang dianalisis dengan bantuan *software* Eviews 12. Pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas, Uji t, Uji f dan Uji Koefisien Determinasi R². Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan dan Infrastruktur Konektivitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 3 DOB di Provinsi Lampung tahun 2017-2023, sedangkan Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan dan Perlindungan Sosial secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 3 DOB di provinsi Lampung tahun 2017-2023. Namun, secara simultan (bersama-sama) Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Infrastruktur Konektivitas dan Perlindungan Sosial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 5 DOB di Provinsi Lampung tahun 2017-2023.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Government Spending on Education Function, Health Function, Connectivity Infrastructure and Social Protection on economic growth in 3 New Autonomous Regions in Lampung Province in 2017-2023. The analytical method used in this study is panel data regression analysis with Common Effect Model (CEM) which is analyzed with the help of Eviews 12 software. Statistical tests used in this study include Multicollinearity and Heteroscedasticity Test, t-test, f-test and R2 Determination Coefficient Test. The results of this study indicate that Government Spending on Education Function and Connectivity Infrastructure partially have a positive and significant effect on economic growth in 3 DOBs in Lampung Province in 2017-2023, while Government Spending on Health Function and Social Protection partially have a negative and significant effect on economic growth in 3 DOBs in Lampung Province in 2017-2023. However, simultaneously (together) Government Spending on Education Function, Health Function, Connectivity Infrastructure and Social Protection have a significant influence on economic growth in 5 DOBs in Lampung Province in 2017-2023..

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Anggi Adya Pratiwi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung,
Lampung, Indonesia
Email: :anggitwi0@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemekaran Daerah Otonomi Baru diatur dalam pasal 33 (ayat) 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakatnya dalam sistem NKRI” [1]. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru [2].

Dalam proses pelaksanaannya, otonomi daerah bertujuan untuk menumbuh kembangkan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, kemandirian dan daya saing daerah [3]. Berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Serta diharapkan dengan rentang kendali yang lebih pendek, pembangunan pada daerah pemekaran baru dapat difokuskan pada kebutuhan dan potensi masing-masing daerah agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan dan wilayah sekitarnya akan lebih cepat maju dan sejahtera dibandingkan sebelum dimekarkan [4].

Pada awal mula terbentuknya pada tahun 1964, Provinsi Lampung hanya memiliki tiga Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Kemudian mengalami pemekaran kembali pada tahun 1999, sehingga total Kabupaten di Provinsi Lampung berjumlah 8 Kabupaten dan 2 kota. Selanjutnya Provinsi Lampung mengalami pemekaran wilayah kembali pada tahun 2007 hingga 2012 dan menghasilkan 5 Kabupaten baru yaitu, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Pada tahun 2008 Provinsi Lampung melakukan pemekaran daerah yang di sah-kan secara bersamaan pada tanggal 6 November 2008, dari pemekaran tersebut terbentuklah tiga daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Meskipun tiga Kabupaten tersebut dimekarkan dalam waktu yang bersamaan namun, kondisi perekonomian dari ketiga Kabupaten tersebut masih cukup fluktuatif antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain, kualitas sumber daya manusia pada daerah tersebut, sumber daya alam daerah, dan ketersediaan kebutuhan dasar seperti sarana dan prasarana publik yang memadai.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat atau perkembangan ekonomi daerah dapat dilihat melalui capaian pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno, (2019) pertumbuhan ekonomi daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian daerah dalam tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang diukur menggunakan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* [5]. PDRB atas dasar harga konstan (*constant price*) yang memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi daerah secara riil [6].

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dalam periode tertentu [7]. Selain

untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah, laju pertumbuhan ekonomi juga mempunyai dampak signifikan terhadap kebijakan pembangunan di daerah, yaitu penentuan prioritas pembangunan daerah dan pengembangan kebijakan berbasis data, peningkatan kerja sama sektor publik dan swasta serta sebagai bahan evaluasi kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah atau stakeholders terkait. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu wilayah, kebijakan harus dirancang seefektif mungkin serta bersifat berkelanjutan.

Provinsi Lampung memiliki 3 daerah otonomi baru yang terbentuk dalam waktu yang bersamaan yaitu, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Daerah-daerah tersebut merupakan hasil dari pemekaran beberapa daerah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi pada lima daerah otonomi baru tersebut terbilang masih cukup bervariasi dalam kurun waktu 2017-2023. Berikut perbandingan laju pertumbuhan ekonomi dari 3 daerah otonomi baru dengan daerah induknya yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Induk dan 3 DOB tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mean
Tanggamus (Induk)	5,19	5,01	5,02	-1,77	2,34	4,16	4,70	3,52
Pringsewu	5,11	5,01	5,03	-1,21	2,91	4,37	4,78	3,71
Tulang Bawang (Induk)	5,45	5,42	5,41	-1,34	2,88	3,85	4,27	3,71
Mesuji	5,20	5,30	5,26	-1,35	2,84	3,49	4,06	3,54
Tulang Bawang Barat	5,55	5,27	5,36	-1,32	2,89	4,49	4,53	3,82

Sumber: Djpk Kemenkeu Provinsi Lampung 2025 (data diolah).

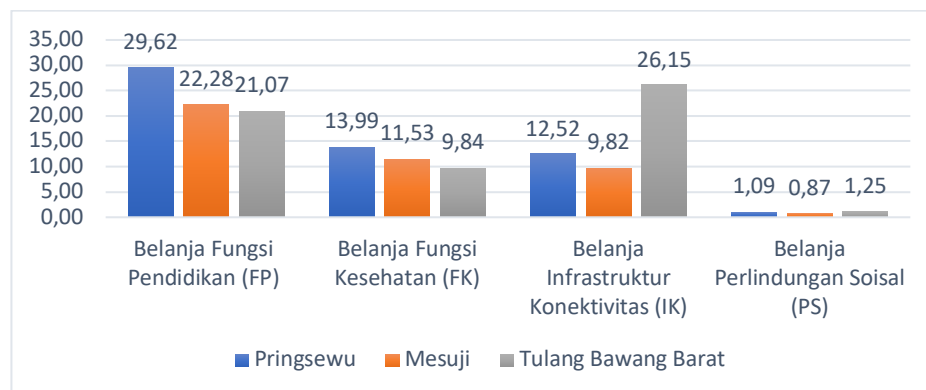
Pada Tabel diatas terlihat bahwa meskipun dimekarkan pada waktu yang bersamaan tiga daerah otonomi baru memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-beda, begitu juga ketika dibandingkan dengan daerah induknya. Kabupaten Pringsewu merupakan DOB dari Kabupaten Tanggamus, dalam kurun waktu 2017-2023 Kabupaten Pringsewu memiliki capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71% dan capaian tersebut lebih besar dibandingkan dengan capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Tanggamus yang merupakan daerah induknya. Sedangkan untuk Kabupaten Mesuji yang merupakan DOB dari Kabupaten Tulang Bawang memiliki capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,54%, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan Kabupaten induknya yaitu sebesar 3,71%. Kabupaten Tulang Bawang Barat juga merupakan DOB dari Kabupaten Tulang Bawang, namun memiliki capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tulang bawang sebagai daerah induknya yaitu sebesar 3,82%. Kabupaten Tulang Bawang memiliki dua daerah pemekaran yang dimekarkan pada waktu yang bersamaan, namun dari dua daerah tersebut, salah satu daerahnya memiliki capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induknya dan satu daerah lainnya memiliki capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah induknya.

Dari ketiga DOB tersebut terdapat dua DOB yang memiliki capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induknya dan terdapat satu DOB yang memiliki capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah induknya. Hal tersebut mengindikasikan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah, hal tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah otonomi baru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi pada tiga DOB di Provinsi Lampung dengan melihat dari sisi kebijakan publik yaitu belanja pemerintah.

Para penganut Keynesian percaya bahwa pemerintah memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan untuk merangsang ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak atau keduanya [8]. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambya [6], yang menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pembangunan sangat bergantung pada kecukupan sumber pendapatan dan belanja pemerintah. Ambya menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan riil per kapita, kesehatan riil per kapita dan infrastruktur riil per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah otonom baru di Indonesia [8]

Menurut Royda [9], belanja daerah yang berhubungan langsung dengan pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi diantaranya belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sedangkan belanja pemerintah yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah belanja perlindungan sosial. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan belanja pemerintah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, infrastruktur konektivitas dan perlindungan sosial tiga DOB di Provinsi Lampung tahun 2017-2023.



Sumber: Djpk Kemenkeu Provinsi Lampung 2025 (data diolah).

Gambar 1. Grafik Perkembangan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Infrastruktur Konektivitas dan Perlindungan Sosial Tiga DOB di Provinsi Lampung Tahun 2017-2023.

Pada grafik di atas terlihat bahwa rata-rata belanja pemerintah fungsi pendidikan menjadi pengeluaran belanja yang paling besar diantara tiga jenis belanja lainnya. Sedangkan belanja perlindungan sosial menjadi pengeluaran belanja pemerintah paling kecil dibandingkan dengan tiga belanja lainnya. Penelitian ini menarik untuk dilakukan guna melihat belanja pemerintah mana dari empat jenis belanja tersebut yang paling berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru, terutama pada tiga DOB di Provinsi Lampung yang di mekar kan dalam waktu yang bersamaan yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. METODE

2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu gabungan antara data observasi lintas sektor (*cross section*) dan data runtun waktu (*time-series*). Data lintas sektor (*cross section*) yang dimaksud adalah 3 daerah otonomi baru di Provinsi Lampung yang di mekar kan dalam waktu yang bersamaan pada 6 November 2008, yaitu (Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat). Serta data runtun waktu (*time-series*) yang dimaksud adalah data yang digunakan

memiliki periode tahun 2017-2023 ($i=3$ dan $t=7$). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Konektivitas, Belanja Perlindungan Sosial dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam satuan persen) dari masing-masing Kabupaten. Seluruh variabel yang digunakan merupakan data gabungan antara data *cross section* dan *time series* dari tahun 2017-2023.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kuantitatif deskriptif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian terhadap sampel dan populasi penelitian. Penelitian kuantitatif deskriptif menyajikan data berupa angka-angka sebagai hasil penelitian. Metode ini digunakan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang ada [10]. Data yang digunakan dalam melakukan analisis pada penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber berbeda. Data laju pertumbuhan ekonomi (Y) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Data realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan (X1), fungsi kesehatan (X2), infrastruktur konektivitas (X3) dan perlindungan sosial (X4) diperoleh dari publikasi *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)* Kemenkeu Provinsi Lampung.

2.3 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini, definisi operasional dirangkum dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Keterangan
Y	Dependen	Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi
X1	Independen	Rasio Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan
X2	Independen	Rasio Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan
X3	Independen	Rasio Belanja Infrastruktur Konektivitas
X4	Independen	Rasio Belanja Perlindungan Sosial

Sumber : Penulis

2.4 Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan model regresi data panel menggunakan bantuan software Eviews 12. Data panel merupakan data gabungan antara data (time series) dan (cross section). Adapun persamaan model dalam bentuk cross section dapat dituliskan dalam model berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = Laju Pertumbuhan Ekonomi

X_{1it} = Belanja Fungsi Pendidikan

X_{2it} = Belanja Fungsi Kesehatan

X_{3it} = Belanja Konektivitas

X_{4it} = Belanja Perlindungan Sosial

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien Variabel Independen

ε_{it} = Variabel Pengganggu

i = Banyak Daerah

t = Periode Waktu (Tahun)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Model Estimasi

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Model Terbaik

Jenis Pengujian	Prob.	Interpretasi
<i>Uji Chow</i>	$0.5652 > 0.05$	<i>Common Effect Model</i>
<i>Uji Lagrange Multiplier (LM)</i>	$0.3012 > 0.05$	<i>Common Effect Model</i>

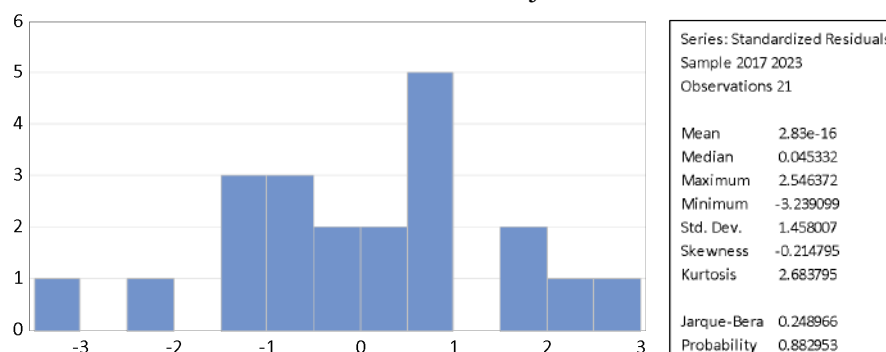
Sumber: Hasil Uji Chow dan Uji LM Dengan Eviews 12, (2025).

Berdasarkan hasil uji chow probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,5652. Hal ini menunjukkan jika nilai probabilitas lebih besar dibandingkan nilai signifikansi 0,05. Sehingga hipotesis yang diterima adalah H_0 dengan interpretasi jika model yang tepat untuk diterapkan sebagai model analisis regresi linear data panel dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*. Begitu pula dengan hasil uji *Lagrange Multiplier (LM)* yang menunjukkan probabilitas 0.3012. Hal ini menunjukkan jika nilai probabilitas lebih besar dibandingkan nilai signifikansi 0,05. Sehingga hipotesis yang diterima adalah H_0 dengan interpretasi jika model yang tepat untuk diterapkan sebagai model analisis regresi linear data panel dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*. Karena dua pengujian tersebut menunjukkan jika model yang tepat adalah *Common Effect Model*, maka untuk uji hausman tidak perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan uji hausman sendiri dipergunakan untuk menguji model manakah yang tepat diterapkan antara Random Effect Model dan Fixed Effect Model.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Estimasi Uji Normalitas



Sumber: Hasil Uji Normalitas Dengan Eviews 12, (2025).

Berdasarkan hasil pengujian normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai *p-value Jarque-Bera* adalah sebesar 0,882953 yaitu lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05 melihat ini, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

3.2.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.451555	-0.4388722	0.266825
X2	0.451555	1.000000	-0.227178	-0.006193
X3	-0.438872	-0.227178	1.000000	0.379550
X4	0.266825	-0.006193	0.379550	1.000000

Sumber: Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Eviews 12, (2025).

Penelitian ini melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan perhitungan *pearson correlation* di mana penilaiannya dilihat berdasarkan nilai koefisien regresinya yakni, tidak lebih dari 0,8 untuk menentukan ada atau tidaknya masalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil estimasi uji multikolinieritas pada tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0,8 maka berdasarkan kriteria perhitungan *pearson correlation* dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada penelitian ini.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/13/25 Time: 23:43				
Sample: 2017 2023				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 3				
Total panel (balanced) observations: 21				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.079121	0.970117	0.081558	0.9360
X1	-0.018050	0.027645	-0.652905	0.5231
X2	0.049172	0.064687	0.760149	0.4582
X3	-0.033670	0.017831	-1.888317	0.0773
X4	1.367138	0.783993	1.743813	0.1004

Sumber: Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Eviews 12, (2025).

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode *Glejser*, di mana dikatakan bahwa apabila nilai probabilitas di atas 0,05 maka penelitian ini lolos dari heteroskedastisitas. Tabel di atas merupakan tabel hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Glejser* dan menggunakan *aresid* sebagai variabel dependen, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada variabel X1 adalah sebesar 0,5231, nilai probabilitas pada variabel X2 adalah sebesar 0,4582, nilai probabilitas pada X3 adalah sebesar 0,0773 dan nilai probabilitas pada X4 adalah sebesar 0,1004 yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat suatu permasalahan heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

3.3 Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel Dengan Common Effect Model

Variabel	Koefisien	Prob.
X1	0.191544	0.0027
X2	-0.299613	0.0309
X3	0.142103	0.0009
X4	-5.188600	0.0038
Prob. (F-statistic)		5.529813
Adjusted R-Squared (R2)		0.475331

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (2025).

Berdasarkan tabel 8. dapat dilihat hasil dari regresi data panel dengan model *common effect* dari penelitian Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 3 DOB di Provinsi

Lampung. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, maka hasil regresi model *common effect* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan (X1), memiliki nilai koefisien sebesar 0.191544 serta nilai probabilitas sebesar 0.0027. Hal ini menunjukkan jika belanja pemerintah fungsi pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y atau pertumbuhan ekonomi pada 3 DOB di Provinsi Lampung. Dengan kata lain ketika belanja pemerintah fungsi pendidikan meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,0027%.
2. Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan (X2), memiliki nilai koefisien sebesar -0.299613 serta nilai probabilitas sebesar 0.0309. Hal ini menunjukkan jika belanja pemerintah fungsi kesehatan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel Y atau pertumbuhan ekonomi pada 3 DOB di Provinsi Lampung. Dengan kata lain ketika belanja pemerintah fungsi kesehatan meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,0309%, begitu juga dengan sebaliknya.
3. Belanja Infrastruktur Konektivitas (X3), memiliki nilai koefisien sebesar 0.142103 serta nilai probabilitas sebesar 0.0009. Hal ini menunjukkan jika belanja infrastruktur konektivitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y atau pertumbuhan ekonomi pada 3 DOB di Provinsi Lampung. Dengan kata lain ketika belanja infrastruktur konektivitas meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,0009%.
4. Belanja Perlindungan Sosial (X4), memiliki nilai koefisien sebesar -5.188600 serta nilai probabilitas sebesar 0.0038. Hal ini menunjukkan jika belanja pemerintah perlindungan sosial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel Y atau pertumbuhan ekonomi pada 3 DOB di Provinsi Lampung. Dengan kata lain ketika belanja perlindungan sosial meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,0038%, begitu juga dengan sebaliknya.

Selanjutnya diketahui nilai Prob. (F-statistic) dari hasil regresi *Common Effect Model* pada penelitian ini adalah sebesar 5.529813, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai F-tabel yaitu 3.01 pada tingkat signifikansi α 5% (0.05) dengan nilai prob. (F-statistik) sebesar 0.005436. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan belanja infrastruktur konektivitas dan belanja perlindungan sosial berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap pertumbuhan ekonomi pada 3 DOB di Provinsi Lampung tahun 2017- 2023.

Selain itu, diketahui juga nilai dari koefisien determinasi (Adjusted R-Squared (R²) yaitu sebesar 0.475331. Hal ini menunjukkan jika variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 47,53%. Sementara sisanya yaitu sebesar 52,47% dapat dijelaskan melalui variabel bebas lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 3 DOB di Provinsi Lampung Tahun 2017-2023.

Pendidikan mempunyai pengaruh yang kuat dan *multifaset* terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui adanya investasi modal manusia (human capital). Menurut Mifrahi & Hanif Nur Rahmat, (2023) pendidikan dapat meningkatkan modal manusia yang melekat pada angkatan kerja sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dengan demikian transmisi pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada tingkat output ekuilibrium yang lebih baik.

Berdasarkan hasil regresi yang dapat dilihat pada Tabel 7. ditunjukan bahwa nilai koefisien Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan (X1) adalah sebesar 0.191544 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0027, lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu (0.05). Oleh karena itu, dapat

diambil kesimpulan bahwa variabel Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) secara parsial pada 3 DOB di Provinsi Lampung periode 2017-2023.

Belanja pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi DOB melalui beberapa saluran. Pertama, dana pendidikan yang digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki sarana prasarana, membayar guru, dan program beasiswa meningkatkan akses serta saling pendidikan. Hasilnya terlihat pada peningkatan angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan komponen pendidikan dalam IPM, yang memperbaiki kualitas tenaga kerja lokal. Kedua, SDM yang lebih terdidik meningkatkan produktivitas, memudahkan penerapan teknologi, dan mendorong wirausaha baru, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan PDRB per kapita DOB dalam jangka menengah-panjang.

Tabel 8. Perbandingan Jumlah Sekolah, Jumlah Siswa dan Rata-Rata Lama Sekolah Pada 3 DOB di Provinsi Lampung Pada Awal diMekarkan Sampai Tahun 2023

Kabupaten	Jumlah Sekolah		Rasio	Jumlah Siswa		Rasio	Rata-Rata Lama Sekolah		Rasio
	2009-2010	2023		2009-2010	2023		2013	2023	
Kab. Pringsewu (2009)	388	619	59,54	89.472	101.313	13,23	7,51	8,42	12,12
Kab. Mesuji (2009)	172	390	126,74	34.673	49.069	41,52	5,65	7,11	25,84
Kab. Tulang Bawang Barat (2010)	230	481	109,13	52.368	68.250	30,33	6,48	7,79	20,22

Sumber :BPS, Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tubaba, Dalam Angka Tahun 2010-2024 (data diolah).

Sejak menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2009, Pringsewu mengalami peningkatan jumlah sekolah dari 388 menjadi 619 unit pada tahun 2023, dengan rasio peningkatan sekitar 59,54%. Peningkatan ini menunjukkan perluasan fasilitas pendidikan yang cukup besar, meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan dua DOB lainnya. Jumlah siswa juga meningkat dari 89.472 menjadi 101.313 orang dengan rasio 13,23%, sehingga daya tampung sekolah bertambah diikuti oleh pertambahan peserta didik, meskipun pertumbuhannya relatif moderat. Rata-rata lama sekolah naik dari 7,51 tahun 2013 menjadi 8,42 tahun 2023 dengan rasio 12,12%, menandakan bahwa penduduk Pringsewu sudah berada pada jenjang pendidikan mendekati SMP kelas akhir mulai mengarah ke pendidikan menengah, namun laju peningkatannya lebih lambat daripada Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Rata-rata belanja pendidikan daerah ini tercatat paling tinggi, yakni sekitar 29,62% namun laju rata-rata pertumbuhan ekonominya 3,71% sedikit berada di tengah jika dibandingkan dua DOB lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun komitmen fiskal terhadap pendidikan relatif besar dan hasil perbaikan pendidikan, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masih bercampur dengan faktor-faktor lain, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejak menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2009 hingga tahun 2023 Kabupaten Mesuji menunjukkan perkembangan paling agresif dari tersedianya fasilitas pendidikan. Jumlah sekolah melonjak dari 172 menjadi 390 unit, dengan rasio pertumbuhan 126,74%, tertinggi di antara tiga DOB. Lonjakan sekolah ini diikuti peningkatan jumlah siswa yang cukup besar, dari 34.673 menjadi 49.069 orang dengan rasio 41,52%. Artinya, perluasan infrastruktur pendidikan benar-benar direspon oleh peningkatan partisipasi pendidikan yang menandakan bahwa penambahan sekolah diikuti peningkatan partisipasi pendidikan yang cukup signifikan. Dampak paling nyata terlihat pada rata-rata lama sekolah yang naik dari 5,65 tahun menjadi 7,11 tahun dengan rasio 25,84%, juga tertinggi di antara 3 DOB. Mesuji yang semula tertinggal (rata-rata pendidikan setara kelas 5 SD) kini bergerak menuju jenjang

SMP awal, menggambarkan keberhasilan DOB dalam mencapai ketertinggalan pendidikan dasar. Hal ini berarti Mesuji yang awalnya tertinggal (rata-rata hanya lulus SD) mulai mengejar jenjang SMP. Meski rata-rata belanja pendidikan “hanya” sekitar 22,28%, pertumbuhan ekonominya 3,54%. Hal ini bisa terjadi karena setiap satuan belanja pendidikan di Kabupaten Mesuji relatif efektif untuk mendorong perluasan akses dan peningkatan lama sekolah, meskipun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan 2 DOB lainnya serta transformasi ke pertumbuhan ekonomi masih berlangsung secara bertahap.

Sejak menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2010 hingga tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kemajuan yang signifikan. Jumlah sekolah bertambah dari 230 menjadi 481 unit, dengan rasio peningkatan 109,13% yang menunjukkan lebih dari dua kali lipat penambahan fasilitas. Jumlah siswa meningkat dari 52.368 menjadi 68.250 orang, rasio 30,33%, menggambarkan luasnya akses pendidikan yang cukup kuat meski tidak sebesar capaian Kabupaten Mesuji. Rata-rata lama sekolah naik dari 6,48 tahun pada tahun 2013 menjadi 7,79 tahun pada tahun 2023 dengan rasio 20,22%, menunjukkan bahwa kemampuan pendidikan penduduk bergerak dari tingkat akhir SD menuju pertengahan SMP. Secara umum, Tulang Bawang Barat berada di posisi tengah yaitu, pertumbuhan fasilitas, siswa, dan lama sekolahnya lebih cepat daripada Pringsewu, namun sedikit di bawah Mesuji dalam hal persentase peningkatan. Menariknya, meskipun rata-rata belanja pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 21,07% sedikit lebih rendah dari Kabupaten Mesuji dan jauh di bawah Pringsewu, rata-rata pertumbuhan ekonominya justru tertinggi yaitu 3,82%. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan pendidikan di Tulang Bawang Barat berjalan seiring dengan dinamika ekonomi daerah lainnya, sehingga perekonomian merespons secara lebih cepat.

Secara keseluruhan dari tiga DOB di Provinsi Lampung menunjukkan pola yang sama yaitu, penambahan jumlah sekolah diikuti pertambahan siswa dan perpanjangan rata-rata lama sekolah. Pringsewu unggul pada tingkat absolut (jumlah sekolah dan siswa terbesar), sedangkan Mesuji dan Tulang Bawang Barat menonjol pada laju pertumbuhan, mencerminkan upaya kuat untuk mencapai ketertinggalan pendidikan pasca pemekaran.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, investasi dalam sektor pendidikan merupakan salah satu modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Lucas (1988) & Romer (1990), pendidikan dapat meningkatkan kapasitas inovatif ekonomi dan perkembangan teknologi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti dalam teori pertumbuhan endogen. Menurut Becker (1994), berpendapat bahwa belanja terhadap pendidikan adalah suatu investasi. Investasi pada pendidikan sama hal nya seperti investasi pada tanah, pengeluaran-pengeluaran tersebut akan membuahkan timbal balik pada masa depan. Pengembangan dalam pendidikan bergantung pada pengeluaran pendidikan, sehingga akan berdampak pada produktivitas dan pendapatan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Royda [9], dimana belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3.4.2 Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 3 DOB di Provinsi Lampung Tahun 2017-2023.

Belanja pemerintah fungsi kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan yang baik memperbaiki produktivitas tenaga kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah [11].

Berdasarkan hasil regresi yang dapat dilihat pada Tabel 7. ditunjukan bahwa nilai koefisien Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan (X2) adalah sebesar -0.299613 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0309 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu (0.05). Oleh karena itu, dapat

diambil kesimpulan bahwa variabel Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) secara parsial pada 3 DOB di Provinsi Lampung periode 2017-2023.

Belanja pemerintah fungsi kesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah terutama melalui peningkatan kualitas kesehatan penduduk dan produktivitas kerja, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator dari belanja pemerintah fungsi kesehatan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, belanja modal (pembangunan rumah sakit/puskesmas, alat kesehatan) dan belanja operasional (obat, tenaga kesehatan). Keseimbangan komposisi ini mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan yang kemudian mempengaruhi produktivitas ekonomi. Sedangkan untuk output dari belanja pemerintah fungsi kesehatan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) pada setiap periode.

Tabel 9. Perbandingan Jumlah Fasilitas Kesehatan Pada 3 DOB di Provinsi Lampung Pada Awal diMekarkan Sampai Tahun 2023

Kabupaten	Rumah Sakit		Puskesmas		Klinik		Jumlah Faskes 2009-2016	Jumlah Faskes 2023	Rasio
	2009-2016	2023	2009-2016	2023	2009-2016	2023			
Pringsewu (2010)	5	7	10	13	3	-	18	20	11,11
Mesuji (2009)	-	2	9	14	14	-	23	16	-30,43
Tulang Bawang Barat (2010)	-	2	9	16	-	13	9	31	244,44

Sumber :BPS, Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tubaba, Dalam Angka Tahun 2010-2024 (data di olah).

Tabel 10. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Pada 3 DOB di Provinsi Lampung Pada Awal Dimekarkan Sampai Tahun 2023

Kabupaten	Angka Harapan Hidup		Angka Harapan Hidup		Raio	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
	2011	2011	2023	2023	Laki-Laki	Perempuan
Pringsewu (2010)	65,54	69,36	69,12	73,07	5,83	5,71
Mesuji (2009)	64,50	68,28	66,81	70,78	5,86	5,94
Tulang Bawang Barat (2010)	66,51	70,37	68,50	72,44	5,80	5,75

Sumber :BPS, Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tubaba, Dalam Angka Tahun 2010-2024 (data diolah).

Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan fasilitas kesehatan dari total 18 unit (rumah sakit, puskesmas, dan klinik) pada periode 2010–2016 menjadi 20 unit pada tahun 2023, dengan kenaikan rasio sekitar 11,11%. Peningkatan ini relatif moderat, namun cukup untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar. Angka harapan hidup laki-laki meningkat dari 65,54 tahun menjadi 69,12 tahun, sementara perempuan naik dari 69,36 tahun menjadi 73,07 tahun, dengan rasio peningkatan sekitar 5,83 tahun untuk laki-laki dan 5,71 tahun untuk perempuan. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan dan gizi penduduk di kedua jenis kelamin. Rata-rata belanja kesehatan Pringsewu tercatat sekitar 13,99 % dan beriringan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 3,71%. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun perluasan fasilitas kesehatan tidak terlalu besar, kombinasi belanja kesehatan dan peningkatan AHH cukup konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Kabupaten Mesuji menampilkan pola yang kontras. Jumlah fasilitas kesehatan justru turun dari 23 unit menjadi 16 unit, dengan rasio $-30,43\%$, sehingga terjadi rasionalisasi atau pengurangan fasilitas tertentu. Meskipun demikian, AHH tetap meningkat: laki-laki dari 64,50 tahun menjadi 66,81 tahun, perempuan dari 68,28 menjadi 70,78 tahun, dengan rasio kenaikan sekitar 5,86 tahun untuk laki-laki dan 5,94 tahun untuk perempuan. Peningkatan ini lebih kecil dibandingkan dua kabupaten lain, sejalan dengan berkurangnya jumlah fasilitas. Rata-rata belanja kesehatan Mesuji sekitar 11,53% relatif tinggi namun rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,54%. Hal ini bisa diartikan bahwa sektor ekonomi lain (misalnya pertanian atau komoditas) lebih dominan mendorong PDRB, sementara perbaikan kesehatan berjalan tetapi tidak secepat daerah pembanding.

Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan perluasan fasilitas kesehatan paling agresif. Jumlah fasilitas yang naik dari 9 unit menjadi 31 unit, dengan kenaikan rasio sekitar 244,44%, menandakan luasnya besaran jaringan pelayanan kesehatan. AHH laki-laki naik dari 66,51 tahun menjadi 68,50 tahun, sedangkan perempuan dari 70,37 menjadi 72,44 tahun, dengan peningkatan sekitar 5,80 tahun untuk laki-laki dan 5,75 tahun untuk perempuan. Peningkatan AHH relatif lebih kecil dibandingkan Pringsewu namun terjadi dari level awal yang sudah lebih tinggi. Menariknya, meskipun rata-rata belanja kesehatan “hanya” sekitar 9,84% (lebih rendah dari Kabupaten Mesuji dan Pringsewu), Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu 3,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan fasilitas kesehatan yang masif, walaupun dengan belanja per unit mungkin lebih efisien, berjalan seiring dengan dinamika sektor ekonomi lain sehingga secara keseluruhan mendorong pertumbuhan yang lebih kuat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan grafik dan interpretasi diatas ialah, bahwa Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi namun, dalam pengalokasiannya harus melalui pengkajian yang lebih dalam agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek belanja pemerintah fungsi kesehatan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang hal tersebut akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi melalui modal manusia yang sehat dan terampil. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan beserta sarana dan prasarana kesehatan lainnya akan memberikan dampak pada peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) yang dapat memberikan representasi dari pengaruh belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia. Dalam meningkatkan modal manusia dapat melalui perbaikan bidang pendidikan, selain itu dapat juga melalui investasi dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk mendorong populasi yang sehat [12]

3.4.3 Pengaruh Belanja Infrastruktur Konektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 3 DOB di Provinsi Lampung Tahun 2017-2023.

Infrastruktur konektivitas mencakup pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi yang berfungsi meningkatkan hubungan antar wilayah serta akses masyarakat terhadap pasar dan layanan publik. Infrastruktur yang memadai terbukti menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa serta mempercepat mobilitas tenaga kerja [13].

Berdasarkan hasil regresi yang dapat dilihat pada Tabel 7. ditunjukan bahwa nilai koefisien Belanja Infrastruktur Konektivitas (X_3) adalah sebesar 0.142103 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0009 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu (0.05). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Belanja Infrastruktur Konektivitas (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) secara parsial pada 3 DOB di Provinsi Lampung periode 2017-2023.

Indikator belanja infrastruktur konektivitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah pada dasarnya menggambarkan seberapa besar dan seberapa efektif pemerintah membangun sarana penghubung (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, telekomunikasi) yang menunjang aktivitas perekonomian.

Tabel 11. Perbandingan Panjang Jalan dan Kondisi Jalan 3 DOB di Provinsi Lampung Pada Awal di Mekarkan Sampai Tahun 2023

Kabupaten	Panjang Jalan		Kondisi Jalan							
	2009-2017	2023	2008-2017				2023			
			Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Pringsewu (2010)	587,5	695,8	141,35	181,51	219,54	45,10	222,20	139,67	33,35	294,29
Mesuji (2009)	570,3	593,9	31,00	10,00	144,06	385,20	112,99	32,37	54,72	311,66
Tulang Bawang Barat (2010)	632,4	1.917,1	237,45	17,96	54,53	254,62	245,64	467,59	140,55	926,09

Sumber :BPS, Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tubaba, Dalam Angka Tahun 2009-2024 (data di olah).

Tabel 12. Rasio Panjang Jalan dan Kondisi Jalan 3 DOB di Provinsi Lampung Pada Awal di Mekarkan Sampai Tahun 2023

Kabupaten	Rasio Panjang Jalan	Rasio Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Pringsewu (2010)	18,44	57,2	-23,0	-84,8	552,5
Mesuji (2009)	4,14	264,5	223,7	-62,0	-19,1
Tulang Bawang Barat (2010)	203,17	3,4	2.503,5	157,7	263,7

Sumber: Olah Data dari Tabel 11.

Total panjang jalan di Kabupaten Pringsewu meningkat dari 587,5 km (2009–2017) menjadi 695,8 km pada tahun 2023, dengan rasio peningkatan sekitar 18,44%. Ini menunjukkan adanya perluasan jaringan jalan baru, meskipun relatif moderat. Namun, dari sisi kualitas terjadi perubahan yang kurang menguntungkan. Pada periode 2008–2016, panjang jalan dalam kondisi baik hanya 141,35 km dan meningkat menjadi 222,20 km pada tahun 2023 (kenaikan sekitar 57,20%). Sebaliknya, kondisi jalan sedang turun dari 181,51 km menjadi 139,67 km (–23,05%), dan jalan rusak juga berkurang dari 219,54 km menjadi 33,35 km (–84,81%), yang positif. Masalah muncul pada kategori kerusakan berat: dari 45,10 km melonjak menjadi 294,29 km, dengan peningkatan rasio sekitar 552,53%. Artinya, meski sebagian jalan yang dulu rusak diperbaiki menjadi baik, cukup banyak ruas yang memburuk menjadi rusak berat, sehingga konsistensi pemeliharaan menjadi isu utama. Kabupaten Pringsewu memiliki rata-rata belanja infrastruktur konektivitas sebesar 12,52%, dengancapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71%. Melihat rasio peningkatan panjang jalan Kabupaten Pringsewu tahun 2009-2023 yang cukup lambat, namun pada periode yang sama kondisi jalan sedang dan rusak mengalami penurunan dan kondisi jalan baik mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan panjang jalan rusak berat namun hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja infrastruktur konektivitas pada periode tersebut lebih banyak digunakan untuk perbaikan kondisi jalan. Hal tersebut memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi, karena semakin panjang jalan dan perbaikan kondisi jalan yang tersedia maka akan semakin mempermudah kegiatan perekonomian.

Mesuji mengalami kenaikan panjang jalan yang relatif kecil dari 570,3 km menjadi 593,9 km, dengan rasio sekitar 4,14%. Perubahan kualitas jalan menampilkan pola yang berbeda. Jalan kondisi baik hanya naik sedikit dari 31,00 km menjadi 112,99 km, namun secara persentase melonjak sekitar 264,48%, yang menunjukkan titik awalnya sangat rendah. Panjang jalan kondisi bertambah tajam dari 10,00 km menjadi 32,37 km peningkatan sebesar 223,70%. Jalan rusak turun dari 144,06 km menjadi 54,72 km (-62,02%), menandakan ada perbaikan yang signifikan. Namun panjang jalan rusak berat hanya turun dari 385,20 km menjadi 311,66 km (-19,09%), sehingga proporsi jalan sangat rusak masih dominan. Kabupaten Mesuji memiliki rata-rata belanja infrastruktur konektivitas sebesar 9,82%, dengan capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,54%. Rata-rata belanja infrastruktur konektivitas Kabupaten Mesuji terkecil diantara 2 DOB lainnya, begitu juga dengan capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonominya. Secara keseluruhan, Mesuji mulai bergerak memperbaiki kualitas jalan, tetapi beban backlog pemeliharaan masih sangat besar karena warisan jalan rusak berat yang luas, serta kecilnya anggaran belanja serta alokasi pada peningkatan panjang jalan sehingga rasio peningkatan panjang jalan pada periode tersebut cukup rendah dibandingkan dengan 2 DOB lainnya.

Tulang Bawang Barat menunjukkan perluasan jaringan jalan paling masif dari 632,4 km menjadi 1.917,1 km pada tahun 2023, dengan rasio peningkatan sekitar 203,17%. Hal ini menggambarkan pembangunan konektivitas yang luar biasa cepat, khas daerah otonomi baru yang membuka akses antarwilayah. Dari sisi kualitas, jalan baik naik dari 237,45 km menjadi 245,64 km (kenaikan sekitar 3,45%), relatif kecil dibandingkan penambahan total panjang jalan, sehingga porsi jalan bagus terhadap total malah menurun. Kondisi jalan sedang melonjak dari 17,96 km menjadi 467,59 km (kenaikan sekitar 2.503,51%), menandakan banyak jalan baru berada dalam kategori sedang. Jalan rusak bertambah dari 54,53 km menjadi 140,55 km (kenaikan 157,75%), dan jalan rusak berat naik drastis dari 254,62 km menjadi 926,09 km (kenaikan sekitar 263,71%). Artinya, perluasan jalan yang sangat besar belum diimbangi kapasitas pemeliharaan; banyak ruas baru dengan cepat masuk kategori rusak dan rusak berat, sehingga kualitas jaringan secara keseluruhan menurun walaupun cakupan geografisnya meluas. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki rata-rata belanja infrastruktur konektivitas sebesar 26,15%, tingginya rata-rata belanja infrastruktur konektivitas pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sejalan dengan pemerataan yang dilakukan, seperti panjang jalan yang mengalami peningkatan pesat dalam kurun waktu 2010-2023, dengan capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,82%, capaian tersebut terbesar diantara 4 DOB lainnya. Meskipun kondisi jalan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh kondisi jalan rusak, namun melalui peningkatan panjang jalan yang cukup pesat memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi, karena semakin mempermudah kegiatan perekonomian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan tabel dan interpretasi di atas ialah, bahwa realisasi belanja infrastruktur konektivitas yang tinggi cukup berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, karena realisasi belanja infrastruktur konektivitas yang tinggi sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah. Menurut Sembanyang, [14] dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur jalan yang baik maka akan meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai layanan sosial maupun ekonomi (pasar), sehingga akan meningkatkan efisiensi logistik dan perdagangan antar daerah. Secara khusus, pembangunan infrastruktur jalan menjadi syarat utama untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonomi dan menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau.

3.4.4 Pengaruh Belanja Perlindungan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 3 DOB di Provinsi Lampung Tahun 2017-2023.

Belanja perlindungan sosial merupakan alokasi anggaran pemerintah yang ditujukan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat rentan agar dapat memenuhi kebutuhan

dasar mereka. Fungsi belanja ini sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Sumiyarti, 2022).

Berdasarkan hasil regresi yang dapat dilihat pada Tabel 7. ditunjukan bahwa nilai koefisien Belanja Perlindungan Sosial (X4) adalah sebesar -5.188600 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0038 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansinya yaitu (0.05). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Belanja Perlindungan Sosial (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) secara parsial pada 3 DOB di Provinsi Lampung periode 2017-2023.

Belanja perlindungan sosial yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah umumnya diukur dengan beberapa indikator input fiskal dan indikator outcome sosial-ekonomi yang menjadi saluran transmisinya.

Tabel 13. Perbandingan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan dan Penduduk Miskin pada 3 DOB di Provinsi Lampung Pada Awal di Mekarkan Sampai Tahun 2023

Kabupaten	Realisasi Jumlah (KPM BANSOS PANGAN)		Rasio	Persentase penduduk miskin		Rasio	Mean BPS	Mean LPE
	2018	2023		2018	2023			
Pringsewu	203.620	194.454	-4,50	10,5	9,14	-12,95	1,08	3,88
Mesuji	38.260	104.694	173,64	7,55	6,73	-10,86	0,87	3,74
Tulang Bawang Barat	69.220	105.868	52,94	8,1	7,25	-10,49	1,23	4,01

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025 (data diolah).

Jumlah KPM Bansos Pangan di Kabupaten Pringsewu menurun dari 203.620 pada 2018 menjadi 194.454 pada 2023, dengan rasio perubahan sekitar -4,50%, yang menunjukkan adanya pengurangan penerima bantuan meskipun tidak terlalu besar. Persentase penduduk miskin juga turun dari 10,5% menjadi 9,14%, dengan penurunan sekitar -12,95%, sehingga penurunan bantuan masih sejalan dengan perbaikan tingkat kemiskinan di daerah ini. Rata-rata belanja fungsi sosial pemerintah daerah berada di angka sekitar 1,09% yang mengindikasikan komitmen anggaran sosial yang relatif baik jika dibandingkan dua kabupaten lainnya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 3,71% menunjukkan perekonomian yang tumbuh moderat dan mendukung tren penurunan kemiskinan di Pringsewu.

Jumlah KPM Bansos Pangan Kabupaten Mesuji meningkat tajam dari 38.260 pada 2018 menjadi 104.694 pada 2023, dengan rasio kenaikan sekitar 173,64%, menandakan perluasan besar cakupan penerima bantuan. Persentase penduduk miskin justru turun dari 7,55% menjadi 6,73%, dengan rasio perubahan sekitar -10,86%, sehingga peningkatan bantuan dapat diartikan sebagai upaya memperkuat jaring pengaman sosial di tengah penurunan kemiskinan. Rata-rata belanja fungsi sosial sekitar 0,87% lebih rendah dibanding Pringsewu dan Tulang Bawang Barat, yang mengindikasikan porsi anggaran sosial relatif lebih kecil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,54% tetap positif, yang berarti perbaikan kesejahteraan di Mesuji tidak hanya ditopang bantuan sosial, tetapi juga kinerja ekonomi yang cukup stabil.

Jumlah KPM Bansos Pangan di Tulang Bawang Barat naik dari 69.220 menjadi 105.868 pada 2023 dengan rasio sekitar 52,94%, menggambarkan peningkatan signifikan penerima bantuan walaupun tidak sedrastis Mesuji. Persentase penduduk miskin turun dari 8,1% menjadi 7,25% dengan rasio sekitar -10,49%, menunjukkan bahwa penambahan bantuan disertai penurunan kemiskinan yang cukup konsisten. Rata-rata belanja fungsi sosial sekitar 1,25% tertinggi di antara 3 DOB lainnya, yang menunjukkan prioritas anggaran yang kuat untuk program sosial. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,82%

juga yang tertinggi, menandakan bahwa selain dukungan sosial, kinerja ekonomi yang lebih baik di Tulang Bawang Barat berpotensi mempercepat penurunan kemiskinan.

Kesimpulannya, kabupaten ketiga menunjukkan bahwa belanja fungsi perlindungan sosial yang relatif kecil namun stabil, jika dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, mampu mendukung penurunan kemiskinan; Pola perubahan jumlah KPM Bansos Pangan di masing-masing daerah mencerminkan strategi yang berbeda dalam menyeimbangkan perluasan jaring pengaman dengan perbaikan kondisi ekonomi. Di Pringsewu, pengurangan moderat KPM berjalan seiring menurunnya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menandakan proses graduasi penerima yang relatif sehat. Di Mesuji dan Tulang Bawang Barat, peningkatan KPM yang signifikan disertai penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi positif, menunjukkan bahwa luasnya bansos berfungsi sebagai penguat jaring pengaman dan penopang daya beli, terutama di daerah yang masih mengalami kerawanan tinggi. Selain itu, studi mengenai belanja bantuan sosial dan modal belanja menunjukkan bahwa kombinasi bansos yang tepat sasaran dan aktivitas ekonomi yang membaik dapat mempercepat penurunan kemiskinan melalui peningkatan daya beli dan kesempatan kerja.

3.4.5 Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Infrastruktur Konektivitas dan Perlindungan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 3 DOB di Provinsi Lampung Tahun 2017-2023

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Belanja Infrastruktur Konektivitas dan Belanja Perlindungan Sosial secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada 3 DOB di Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai uji F-hitung sebesar 5.529813 lebih besar dibandingkan F- tabel sebesar 3.01 pada tingkat signifikansi (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan (X1), Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan (X2), Belanja Infrastruktur Konektivitas (X3) dan Belanja Perlindungan Sosial (X4) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y) pada 3 Daerah Otonomi Baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat) di Provinsi Lampung periode 2017-2023.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas, dan perlindungan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Lampung—Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat—selama periode 2017–2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan infrastruktur konektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pendidikan berperan sebagai investasi modal manusia yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah–panjang yang lebih inklusif. Sementara itu, belanja infrastruktur konektivitas, khususnya jalan, memperlancar mobilitas barang dan jasa, menurunkan biaya distribusi, mendorong aktivitas usaha, serta menarik investasi.

Sebaliknya, belanja kesehatan dan perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa dominasi belanja rutin dan kuratif pada sektor kesehatan serta belanja perlindungan sosial yang bersifat konsumtif dan kurang berorientasi pada pemberdayaan membatasi dampak produktifnya terhadap perekonomian daerah. Selain itu, perbedaan waktu antara realisasi belanja dan munculnya manfaat ekonomi, serta keterbatasan efisiensi dan ketepatan sasaran, turut memengaruhi hasil tersebut.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya efektivitas, komposisi, dan orientasi produktif belanja pemerintah daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Daerah Otonom Baru.

REFERENSI

- [1] S. Akbar, “Analisa masalah-masalah yang muncul dalam pemekaran wilayah baru pada penyelenggaraan otonomi daerah,” *Jurnal Ilmiah*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2018.
- [2] N. Tabuni, W. Waworundeng, and S. Sampe, “The perspective of the Papua Provincial Government on the acceptance of regional expansion new autonomy in Papua Province,” *Journal*, vol. 5, pp. 1235–1246, 2023.
- [3] Husodo, *Pembangunan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta, Indonesia: Pustaka UT, vol. 1, no. 1, pp. 1–340, 2020.
- [4] U. Ciptawaty, “Pola pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru (DOB) berdasarkan tipologi Klassen di Provinsi Lampung (Lampung Timur, Way Kanan, dan Kota Metro),” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 8, no. 2, pp. 229–241, 2019.
- [5] M. Dardanila and R. M. Sari, “Analisis potensi dan proyeksi perekonomian Provinsi Lampung tahun 2023,” *Jurnal*, vol. 11, no. 2, pp. 145–160, 2023.
- [6] Ambya, “Perkembangan daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Lampung (model tipologi Klassen),” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 8, no. 3, pp. 199–210, 2019, doi: 10.23960/jep.v8i3.63.
- [7] I. Hermawan, “Analisis pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi,” *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 1, no. 2, pp. 32–48, 2019, doi: 10.52005/aktiva.v1i2.27.
- [8] T. H. Prasetyo, “Bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” *Tesis*, Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2013.
- [9] F. N. M. Royda, “Pengaruh belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan,” *Sustainability*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2019.
- [10] Y. R. Pratama, “Efektivitas aplikasi Siprakastempra terhadap pelayanan PKL di SMK Muhammadiyah Prambanan Sleman,” *Eprints UNY*, pp. 1–23, 2019.
- [11] J. Jamaludin and H. Juliansyah, “Pengaruh belanja pemerintah terhadap pendapatan per kapita Indonesia,” *Jurnal Ekonomika Indonesia*, vol. 9, no. 2, p. 1, 2020, doi: 10.29103/ekonomika.v9i2.3178.
- [12] H. Suparno, “Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur,” *Journal of Innovation in Business and Economics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–22, 2015, doi: 10.22219/jibe.vol5.no1.1-22.
- [13] Y. Rajab and A. Malik, “Peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” *Jurnal Universitas Pahlawan*, 2023.
- [14] L. K. B. Sembayang, “Analisis keterkaitan ketersediaan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Pendekatan analisis Granger causality,” *Jurnal*, vol. 4, pp. 14–22, 2011.